

## ABSTRAK

**MAQPIRATUR RIDHA, NPM : 2022474, Judul : “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS LAPANGAN DWI WARNA)”** dibawah bimbingan Bapak **Dr.Irza Setiawan, S.Sos,M.AP.** sebagai Pembimbing I dan Bapak **Haris Fadillah, S.sos,M.AB,CLMA.** sebagai Pembimbing II.

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lapangan Dwi Warna Barabai mencerminkan dilema antara urgensi ekonomi kerakyatan dan tantangan penataan kota. Sebagai pusat aktivitas sosial yang dikelilingi instansi pemerintahan, kawasan ini bertransformasi menjadi pusat kuliner strategis namun memicu kemacetan serta masalah kebersihan. Meskipun Perda No. 11 Tahun 2013 telah menetapkan kewajiban menjaga ketertiban dan perizinan, realitas di lapangan menunjukkan rendahnya kepatuhan pedagang serta minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Akibatnya, keberadaan PKL justru mengokupasi trotoar dan merusak estetika lingkungan, sehingga penelitian ini krusial untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor penghambat penataan PKL di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Studi kualitatif deskriptif ini berlokasi di Lapangan Dwi Warna, Barabai, untuk membedah implementasi kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui kacamata teori George C. Edward III. Dengan memosisikan peneliti sebagai instrumen kunci, data primer digali secara mendalam melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap sepuluh informan yang dipilih menggunakan teknik *Purposive sampling*. Pengumpulan data juga didukung oleh sumber sekunder berupa literatur dan regulasi terkait guna memastikan validitas informasi. Untuk menjamin akurasi dan kredibilitas temuan, peneliti menerapkan teknik analisis data sistematis serta uji triangulasi yang menggabungkan berbagai sumber, teknik, dan waktu pengamatan di lapangan secara alami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek komunikasi yang mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi belum baik. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi yang belum merata kepada pedagang kaki lima, ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan dan kurangnya kejelasan tentang isi kebijakan yang ditetapkan. Pada aspek sumber daya yang mencakup staf, informasi, fasilitas sudah berjalan dengan baik dan mendukung pelaksanaan kebijakan, aspek disposisi menunjukkan bahwa pengangkatan birokrasi dan insentif telah dilaksanakan dengan baik, dan terakhir pada struktur birokrasi yang mencakup SOP dan fragmentasi dinilai sudah cukup baik. Factor pendukung yaitu ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dan adanya SOP yang jelas dan tertulis, sedangkan factor penghambat yaitu sosialisasi kebijakan yang belum merata dan tujuan dan sasaran kebijakan tidak dirumuskan secara spesifik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No 11 tahun 2013 tentang pengelolaan pedagang kaki lima belum berjalan dengan optimal, khususnya pada aspek komunikasi. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan transmisi, kejelasan, konsistensi, serta penguatan SOP agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan efektif.

**Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Implementasi kebijakan, Pemerintah Daerah**

## ABSTRACT

**MAQPIRATUR RIDHA, NPM: 2022474, Title: "IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NO. 11 OF 2013 CONCERNING STREET VENDOR MANAGEMENT (CASE STUDY OF THE DWI WARNA FIELD)"** under the guidance of **Dr. Irza Setiawan, S.Sos, M.AP.** as Supervisor I and **Mr. Haris Fadillah, S.Sos, M.AB, CLMA.** as Supervisor II.

The phenomenon of street vendors (PKL) in Dwi Warna Barabai Square reflects the dilemma between the urgency of a people's economy and the challenges of urban planning. As a center of social activity surrounded by government agencies, this area has transformed into a strategic culinary hub, but this has led to congestion and hygiene issues. Although Regional Regulation No. 11 of 2013 stipulates the obligation to maintain order and obtain permits, the reality on the ground shows low compliance among vendors and minimal outreach from the local government. As a result, street vendors (PKL) occupy sidewalks and damage the aesthetics of the environment. Therefore, this research is crucial for evaluating the effectiveness of policy implementation and identifying factors inhibiting street vendor management in Hulu Sungai Tengah Regency.

This descriptive qualitative study, conducted at Dwi Warna Field, Barabai, examines the implementation of street vendor (PKL) management policies through the lens of George C. Edward III's theory. Positioning the researcher as the key instrument, primary data was thoroughly explored through observation, documentation, and in-depth interviews with ten informants selected using a Purposive sampling technique. Data collection was also supported by secondary sources in the form of literature and relevant regulations to ensure the validity of the information. To ensure the accuracy and credibility of the findings, the researcher employed systematic data analysis techniques and triangulation tests, combining various sources, techniques, and observation periods in the natural setting.

The results of this study indicate that communication aspects, including transmission, clarity, and consistency, have not been implemented effectively. This is due to uneven information dissemination to street vendors, inconsistencies in the application of regulations, and a lack of clarity regarding the content of established policies. Resources, including staff, information, and facilities, have been implemented effectively and support policy implementation. Disposition aspects indicate that bureaucratic appointments and incentives have been implemented effectively. Finally, bureaucratic structure, including standard operating procedures (SOPs) and fragmentation, is considered adequate. Supporting factors include the availability of supporting facilities and infrastructure and the existence of clear and written SOPs. Contraindicating factors include uneven policy dissemination and the lack of specific policy objectives and targets.

Based on these research results, it can be concluded that the implementation of Regional Regulation No. 11 of 2014 concerning street vendor management has not been optimal, particularly in the communication aspect. Therefore, it is necessary to improve transmission, clarity, consistency, and strengthen SOPs to effectively achieve policy objectives.

***Keywords: Street Vendors, Policy Implementation, Local Government***